



**Judul** : DPR Dorong Danais Disalurkan Ke Desa  
**Tanggal** : Selasa, 09 Juli 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus  
DPR mendesak  
Pemda Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
(DIY) menyalurkan  
dana keistimewaan  
(Danais) hingga  
ke desa.

## Atasi Ketimpangan Ekonomi Daerah Istimewa

# DPR Dorong Danais Disalurkan Ke Desa

PARA wakil rakyat menyakini, penyaluran danais hingga ke tingkat terendah dapat memperkecil kesenjangan di tengah masyarakat, terlebih provinsi tersebut memegang rekor tingkat ketimpangan (ratio gini) tertinggi secara nasional.

Anggota Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus DPR My Esti Wijayanti menilai, penggunaan danais di Provinsi DIY tak berlangsung secara terbuka dan transparan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY tak melibatkan masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan rencana dan peng-

gunaan Danais.

"Ini (tidak adanya pelibatan masyarakat dan DPRD) mengisyaratkan tidak adanya transparansi penggunaan Danais. Dulu, sempat ada pasal yang mengatur itu. Namun, sepertinya pasal itu dihilangkan," tegas Esti dalam audiensi dengan Pemprov DIY di Kompleks Pemda DIY, Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.

Ke depan, politisi PDIP itu mendesak, Danais Provinsi DIY dapat menyalurkan hingga ke desa. Menurutnya, penyaluran danais hingga ke tingkat desa dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, seka-

ligus mengurangi rasio gini di Provinsi DIY.

"Saat ini, rasio gini DIY mencapai 0,422. Angka ini lebih tinggi dibanding angka nasional yang hanya sebesar 0,384," sesal

Selain itu, lanjut Esti, keterlibatan masyarakat dan anggota DPRD dalam penyusunan rencana dan penggunaan Danais di seluruhnya oleh Pemda DIY. Sejak dikurangkan pada Tahun 2012, jumlahnya terus meningkat dari Rp 500 miliar.

"Di sini (DIY), Danais dikelola seluruhnya oleh Pemda DIY. Sejak dikurangkan pada Tahun 2012, jumlahnya terus meningkat dari Rp 500 miliar. Tahun ini, DIY menerima Rp 1,2 triliun dengan tingkat penggunaan hingga 96 persen," ungkap

Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan ini.

Selain mendesak alokasi anggaran hingga ke tingkat desa, Fadli meminta, danais Provinsi DIY diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan kerakyatan. Dengan begitu, kehadiran dana tersebut dapat membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat Yogyakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY Gatot Saptadi mengakui, penyusunan dan penggunaan Danais tidak melibatkan DPRD dan masyarakat. Menurutnya, Danais menyalurkan bersamaan dengan APBD DIY. ■ ONI